LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Triwulan IV Tahun 2022 dapat tersusun. Laporan kinerja tahunan (LAKIN) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 tahun 2021, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan pengendalian kebijakan K/L terkait isu bidang politik dalam negeri. Dalam proses pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri triwulan IV tahun 2022 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri triwulan IV tahun 2022. Semoga LAKIN Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri triwulan IV tahun 2022 dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi guna kemajuan organisasi Unit Kerja Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

Jakarta, Februari 2023
Deputi Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

Mayjen TNI Djaka Budhi Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1

D. Aspek Strategis Organisasi 4

E. Sumber Daya Organisasi 6

F. Permasalahan Utama 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam 10

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 14

C. Rencana Kinerja Tahunan 25

D. Perjanjian Kinerja 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Pengukuran Kinerja 28

B. Capaian Kinerja 28

C. Analisis Capaian Kinerja 29

D. Capaian Kinerja Lainnya 43

E. Realisasi Anggaran 43

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA 45

BAB IV PENUTUP 46

LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi v
Tabel 2 Sumber Daya Manusia 6
Tabel 3 Sumber Daya Anggaran 8
Tabel 4 Sasaran Strategis Kemenko Polhukam 12
Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam 13
Tabel 6 Indikator Tujuan 15
Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,Unit Pelaksana 16
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama 17
Tabel 9 Arah Kebijakan dan Strategi 20
Tabel 10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi 22
Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan 26
Tabel 12 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 27
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama 28
Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1 29
Tabel 15 Perbandingan Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022 31
Tabel 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 (2021-2022) 33
Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 (2021-2022) 34
Tabel 18. Capaian Tindaklanjut Rekomendasi 34
Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 3 35
Tabel 20 Kategori Penilaian SAKIP 35
Tabel 21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 (2021-2022) 37
Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja 5 (2021-2022) 38
Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja 6 (2021-2022) 41
Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja 7 (2021-2022) 42
Tabel 25 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Deputi Bidkoor Poldagri 4

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dampak adanya pandemi Covid-19, setelah dua tahun melanda Indonesia, kemungkinan masih dapat dirasakan tahun 2022. Secara umum, kondisi Indonesia mengawali tahun 2022 tidaklah mudah. Gelombang baru Pandemi Covid-19 mulai dirasakan masyarakat akibat munculnya varian baru. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menghambat upaya untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, telah menetapkan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terus berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi bidang politik dalam negeri, tahun 2022 merupakan langkah penting karena tahapan awal menyambut pesta demokrasi terbesar yakni Pemilu Serentak yang digelar tahun 2024. Bahkan, tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dimulai 14 Juni 2022.

Konsolidasi demokrasi yang dituangkan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) juga menjadi atensi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Apalagi, pengukuran IDI tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 ini menggunakan metode baru karena terdapat beberapa indikator yang tidak relevan.

Isu lain yang menjadi sorotan juga adalah koordinasi bidang otonomi daerah dan desentralisasi serta otonomi khusus atau tugas lain yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Pada tahun 2022, Deputi I/Poldagri memiliki dua sasaran strategis sebagai berikut: 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif; 2) Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (93%),
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (100%),
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (50%),
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (A),
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) (33,94),

6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poldagri (skala 4),
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (85).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya,dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindaklanjut yang diberikan. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2022
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%	107,17%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	50%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96,5%
Meningkatnya birokrasi yang efektif di bidang koordinasi politik dalam negeri	4. Nilai SAKIP	A	BB
	5. Nilai PMPRB	33,94	35,70
	6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Skala 1-5)	4	4,5
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	85	88

Selama tahun 2022, anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami beberapa kali penyesuaian (*automatic adjustment*), sehingga pagu anggaran menjadi Rp 12.892.512.000. Dari pagu anggaran tersebut, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, serapannya mencapai Rp 12.810.438.731,- (dua belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau 99,36%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sampai dengan triwulan IV tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Poldagri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Laporan kinerja disusun sebagai wujud pemenuhan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sampai dengan triwulan IV tahun 2022 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum terbentuknya Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi I/Poldagri dapat melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra di antaranya: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksanaan Agung; Tentara Nasional Indonesia (TNI); Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi lain yang dianggap perlu.

2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur organisasi di unit kerja Kedeputian I/Poldagri sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Penguatan Partai Politik, dan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

2. Asisten Deputi terdiri dari tiga bagian, dengan perincian sebagai berikut:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan:
      1) Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi,
      2) Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan
      3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
      1) Bidang Desentralisasi;
      2) Bidang Otonomi Daerah; dan
      3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
      1) Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
      2) Bidang Penguatan Partai Politik; dan
      3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
   d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
      1) Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta;
      2) Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
      3) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Sekretaris Deputi terdiri atas tiga bagian, yaitu:
   a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari satu subbagian yakni:
      - Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
   b. Bagian Administrasi terdiri dari satu subbagian yaitu:
      - Subbagian Dukungan Administrasi.
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan demikian, Struktur Organisasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, dapat dijelaskan pada bagan berikut ini:

Gambar 1 Susunan Organisasi Deputi Bidkoor Poldagri

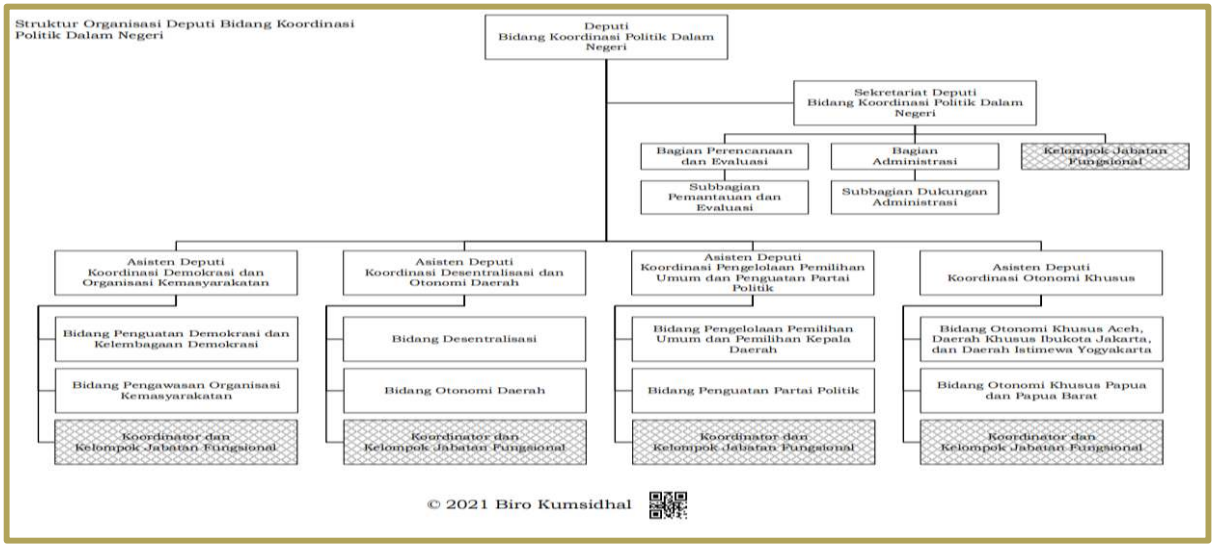

D. Aspek Strategis Organisasi

Jika mengacu Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merupakan salah satu unit eselon I yang ada di Kemenko Polhukam. Selain Deputi Bidang Poltik Dalam Negeri, ada beberapa unit kerja lainnya, yakni: (a). Sekretariat Kementerian Koordinator; (b). Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; (c). Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; (d). Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; (e). Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; (f). Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (g). Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; (h). Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; (i). Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; (j). Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; (k). Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; (l). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan (m). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dibantu 4 (empat) Asisten Deputi dan 1 (satu) Sekretaris Deputi, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi; koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;

2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan tugasnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
5. Sekretariat Deputi, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diharapkan mampu mendukung visi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu ***"Mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom; serta menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional."*** Untuk mencapai RPJP tersebut, pemerintah telah membuat tahapan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah memperkuat "**Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**". Salah satu Indikator untuk mencapai sasaran tersebut yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dihitung secara berkala setiap tahun. Target IDI tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sesuai RKP 2022 sebesar 78,06.

Kemenko Polhukam, khususnya Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selaku *leading sector* sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan instansi terkait untuk kelancaran penyusunan indeks dimaksud. Penyusunan indeks dikerjasamakan dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei dan pengolahan data. Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, Deputi memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan stabilitas politik di Indonesia yang menjadi persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional.

E. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, sumber daya manusia yang ada di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
1.	Deputi	Mayjen TNI AD	1
2.	Sekretaris Deputi	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3.	Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Demokrasi dan Kemasyarakatan	Brigjen Polisi	1
4.	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
5.	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	Brigjen TNI	1
6.	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus	Brigjen TNI	1
7.	Kepala Bagian (Kabag) Administrasi	Pembina (IV/a)	1
8.	Kabag Perencanaan dan Evaluasi	Penata Tingkat I (III/d)	1
9.	Kepala Bidang (Kabid) Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	Kolonel	1
10.	Kabid Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kolonel	1
11.	Kabid Desentralisasi	-	0
12.	Kabid Otonomi Daerah	Kolonel	1

No	JABATAN	GOL/PANGKAT	JUMLAH
13.	Kabid Pengelolaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	Kolonel	1
14.	Kabid Penguatan Partai Politik	Kolonel	1
15.	Kabid Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Kolonel	1
16.	Kabid Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Kolonel	1
17.	Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pemantauan dan Evaluasi	Kapten TNI	1
18.	Kasubag Dukungan Administrasi	Penata (III/c)	1
19.	Analis Anggaran Ahli Muda	Penata (III/c)	1
20.	Penyusun Program dan Anggaran	Kapten TNI	1
21.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
22.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Penata Muda (III/a)	1
23.	Analis Politik, Hukum dan Keamanan pada Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
24.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Penata Muda (III/a)	1
25.	Analis Politik, Hukum dan Keamanan pada Bidang Penguatan Partai Politik	Penata Muda (III/a)	1
26.	Pengadministrasi Perencanaan dan Progam	Penata Muda (III/a)	1
27.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pengatur Tk. I (II/d)	1
28.	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur (II/c)	1
29.	PPNPN	PPNPN	6
JUMLAH			**34**

2. Anggaran

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam awal, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2022

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.283.115.000 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja lima program yaitu Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Koordinasi Otonomi Khusus, Sekretariat. Namun, pada triwulan II tahun 2022, terjadi automatic adjustment sebesar Rp 2.301.286.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga pagu anggaran menjadi Rp 12.217.673.000. Kemudian pada triwulan IV mengalami penyesuaian kembali menjadi Rp 12.810.438.731,- (dua belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Perincian alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Sumber Daya Anggaran
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
Koord Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	1.926.588.000
Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2.736.595.000
Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik	1.527.405.000
Koord Otonomi Khusus	5.412.649.000
Sekretariat	1.289.275.000
Jumlah	**12.810.438.731**

F. Permasalahan Utama

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam pada tahun 2022 akan fokus mendukung tema RKP 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan demokrasi dalam hal ini penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kondisi organisasi kemasyarakatan, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal tersebut menjadi prioritas Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam

1. Visi, dan Misi

Dalam menyusun perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan

fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu:

(1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;

(2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan

(3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. **Tujuan dan Sasaran Strategis**

a. Tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;
   Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan penguatan kelembagaan.
   Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Kemenko Polhukam.

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 4 Sasaran Strategis Kemenko Polhukam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Dalam mengawal arah kebijakan dan strategi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua prioritas nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib

dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sementara itu, arah kebijakan untuk bidang politik dalam negeri difokuskan pada konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa strategi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik; • Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu; • Pengendalian situasi daerah otonomi khusus; • Optimalisasi fungsi otonomi daerah; • Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil; • Simpilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia; • Pengembangan teknologi Pemilu (*E-Voting*); • Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; • Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat; • Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an; • Peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional; • Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan • Penguatan peran pers dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan nasional, khususnya agenda VII bidang Polhukhankam terkait langsung dengan agenda koordinasi Kemenko Polhukam dan dijabarkan ke dalam Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sasaran dan arah kebijakan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diselaraskan dengan Renstra Kemenko Polhukam juga sebagai pedoman. Uraian Renstra Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020-2024 memuat visi, misi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi, dan Misi

Dalam merencanakan kinerja harus sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

a. Visi

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 juga memperhatikan pencapaian sebelumnya pada pembangunan jangka menengah nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu ***"Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan politik dalam negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan koordinasi politik dalam negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".***

b. Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan visi Presiden, maka rumusan misi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: "Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri" dengan membuat

rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu:

1) Menyusun rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang berkualitas;
2) Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
3) Mewujudkan reformasi birokrasi dengan tata kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu (1) satu sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang dicapai selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;

   Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan;

   Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Target tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Tujuan

No.	Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	75,30	75,35	75,40	75,45	75,50
2.	Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan gambaran capaian kinerja yang akan dihasilkan melalui ukuran kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1-5) tahun dan diuraikan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022. Dengan demikian, sasaran strategis dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif,
2. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal,
3. Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020 terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,Unit Pelaksana Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelesaian permasalahan bidang politik dalam negeri	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.	Semua Kepala Bidang di masing-masing Asisten Deputi.	
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam			
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	UNIT PELAKSANA ESELON II	UNIT PELAKSANA ESELON III	UNIT PELAKSANA ESELON IV
Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	4. Nilai SAKIP	Sekretaris Deputi	Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi;
	5. Nilai PMPRB		Kepala Bagian Administrasi	Kasubag Dukungan Administrasi
	6. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)		Kepala Bagian Administrasi	Kasubag Dukungan Administrasi
	7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.		Kepala Bagian Program dan Evaluasi	Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pemantauan dan Evaluasi;

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga telah menyusun indikator kinerja untuk periode lima tahun (2020-2024). Indikator tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang disetujui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	*Baseline*	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.					
IK 1.1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama	*Baseline*	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
IK 1.2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	85%	86,5%	87,5%	88,5%	89,5%
SS 2	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal					
IK 2.1	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3	Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal					
IK 3.1	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A
IK 3.2	Nilai PMPRB	23,37	23,37	23,37	23,38	23,38
IK 3.3	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)	4	4,2	4,3	4,4	4,5
IK 3.4	Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.	80	83	85	87	90

Namun demikian, setelah dilakukan *review,* terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Perubahan ini dalam rangka membuat target lebih realistis dengan kondisi saat ini dan tantangan ke depan. Dengan demikian, IKU Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dijelaskan pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Cara Pengukuran
			2022	2023	2024	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%	94%	95%	$\sum = \frac{Realisasi\ Hasil\ IDI}{Target\ IDI} x100$
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%	100%	$\sum = \frac{Realisasi\ Rekomendasi\ terkait\ IDI}{Target\ Rekomendasi\ terkait\ IDI} x100$
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	$\sum = \frac{Butir - butir\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ sesuai\ dok\ ren\ yang\ ditindaklanjuti}{Butir - butir\ rekomendasi\ kebijakan\ yang\ dihasilkan} x100$
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	A	A	A	Hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Kategori Penilaian: 1. AA (.90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); 7. D (0-30)

		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	33,94	33,95	33,96	Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Pollhukam. Skala nilai 0-36,5

3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu:

Tabel 9 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan	Strategi
Konsolidasi Demokrasi	• Sinkronisasi peraturan Perundang-undangan bidang politik
	• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu
	• Pengendalian (Koordinasi dan sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;
	• Optimalisasi fungsi otonomi daerah
	• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
	• Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia
	• Pengembangan teknologi Pemilu *(E-Voting)*
Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	• Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi
	• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi

Arah Kebijakan	Strategi
	Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penguatan manajemen kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel
	• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
	• Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi
Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.
Penguatan pilar demokrasi	• Koordinasi penguatan pilar demokrasi
Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	• Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	• Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	• Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
Penataan Daerah Otonom Baru	• Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	• Koordinasi penataan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah

Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	• Koordinasi peningkatan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	• Koordinasi, sinkronisasi, pengendalian di daerah otonomi khusus
	• Sinkronisasi komunikasi dan diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

Dengan penjelasan di atas, maka keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
”Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan	“Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri”	1.Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik; 2. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	**1.** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif, **2.** Pelaksanaan tugas khusus yang optimal, **3.** Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.	**2.** Konsolidasi Demokrasi	•Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik •Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu •Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus; •Optimalisasi fungsi otonomi daerah •Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".					•Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia •Pengembangan teknologi Pemilu *(E-Voting)*
				3. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik	•Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi •Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
					•Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri •Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
				4. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik	Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.
				5. Penguatan pilar demokrasi	Koordinasi penguatan pilar demokrasi
				6. Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat	Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat
				7. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri	Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri
				8. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Strategi
				9. Penataan Daerah Otonom Baru	Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru
				10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
				11. Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi
				12. Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus	•Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus •Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. RKT di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target	Satuan	Alokasi Anggaran
01	***Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sectoral yang efektif***			11.603.237.000
01.01	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93	%	
01.02	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100	%	
01.03	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50	%	
02	***Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri***			***1.289.275.000***
02.01	Nilai SAKIP	A	Skor	
02.02	Nilai PMPRB	33,94	Skor	
02.03	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4	Indeks	
02.04	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	85	Indeks	

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2022 dibuat untuk mendukung program Kemenko Polhukam dalam rangka mencapai target perencanaan nasional diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 12 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sectoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%
Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	A
	5. Nilai PMPRB	33,94
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2022 untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan guna menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran melalui alat ukur indikator kinerja utama.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) dan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja ini dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaiannya baik. Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan memanfaatkan laporan kinerja triwulanan dan tahunan, sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang cepat, akurat dan akuntabel.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diukur dari dua sasaran strategis dengan menggunakan tujuh indikator kinerja. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, capaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI Triwulan IV Tahun 2022
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%	107,17%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%	50%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96,5%
Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	A	BB
	5. Nilai PMPRB	33,94	35,70
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4	4,5
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	85	88

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif

Pencapaian sasaran strategis 1 adalah untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri. Pengukuran sasaran strategis menggunakan alat ukur tiga indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	93%	107,17%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.	100%	50%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96,5%

a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam

1) Definisi Indikator Kinerja 1

Dalam manual perjanjian kinerja yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, indikator target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Selama 12 tahun penghitungan IDI (2009 s.d 2021), dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Oleh karena itu, mulai tahun 2022, Kemenko Polhukam, Kemendagri, Bappenas dan BPS sepakat menerapkan IDI metode baru dalam pengukuran IDI 2021.

Hasil pengukuran IDI disampaikan dalam bentuk angka dengan rentang 0 s.d 100. Adapun target hasil pengukuran IDI 2021 sesuai RKP 2022 sebesar 78,06 dan target IDI pada akhir periode RPJMN 2020-2024 sebesar 78,37. Namun demikian, dalam perjanjian kinerja, target capaian IDI hanya 93% dari target RKP (78,06) sebesar 72,6.

2) Capaian Indikator Kinerja 1

- Capaian Utama

IDI 2021 nasional mencapai angka 78,12 dalam skala 0 sampai 100. Capaian tersebut berada pada kategori “sedang” dengan angka masing-masing aspek yaitu Aspek Kebebasan sebesar 79,72, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 78,86, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,67. Dari indeks aspek bisa diperoleh kesimpulan bahwa ketiganya memiliki capaian yang setara karena dalam rentang nilai yang berdekatan (75 – 79). Aspek kapasitas lembaga demokrasi memiliki nilai paling rendah karena masih rendahnya skor indikator kinerja lembaga legislatif di pusat dan daerah, serta capaian indikator pendidikan politik untuk kader partai politik di provinsi. Beberapa indikator tersebut memiliki nilai di bawah 60.

IDI 2021 Pusat mencapai angka 81,33 dalam skala 0 sampai 100. Capaian kinerja demokrasi Indonesia pusat tersebut berada pada kategori “tinggi” dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek Kebebasan sebesar 77,59, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 81,51, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 84,80. Pada IDI pusat aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu-satunya yang berada dalam kategori sedang (60-80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Pada indikator ini kasus-kasus yang masuk adalah hambatan demonstrasi oleh aparat, atau peretasan pada media massa, doxing, dan hambatan pada kebebasan berpendapat termasuk yang terjadi di media sosial.

IDI 2021 Provinsi mencapai angka 76,08 dalam skala 0 sampai 100. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori “sedang” dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek kebebasan sebesar 81,08, (2) Aspek kesetaraan sebesar 77,17, dan (3) Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 69,86.

Berdasarkan peringkat, lima provinsi dengan indeks tertinggi yaitu DKI Jakarta (82,08), Jawa Timur (81,31), D.I. Yogyakarta (81,21), Jawa Tengah (81,15), dan Kalimantan Timur (81,02). Sementara itu, lima provinsi dengan indeks terendah adalah Sulawesi Barat (71,30),

Maluku Utara (68,82), Papua Barat (68,68), Maluku (66,76), dan Papua (66,39).

Tabel 15 Perbandingan Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022 dan target nasional

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Dibanding RKP	% Dibandingkan Renstra
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen Kemenko Polhukam	100%	95,21	93%	107,17%	100,07%	107,17%

- Kegiatan yang Telah Dilakukan

  Sampai triwulan IV tahun anggaran 2022, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

JANUARI
- Evaluasi Penyusunan IDI 2020 pada TA 2021.
- Penerapan IDI Metode Baru.
- Pembahasan Rencana Program Penyusunan IDI 2021 pada TA 2022.
- Konsolidasi sumber data IDI 2021.

FEBRUARI
- Lanjutan konsolidasi sumber data IDI 2021.
- Verifikasi data-data IDI 2021.

MARET
- Lanjutan Verifikasi Data-data IDI 2021.
- Finalisasi hasil pengukuran IDI 2021.

April
- Finalisasi verifikasi data IDI 2021

Mei
- Persiapan Rilis IDI 2021

Juni
- Publikasi IDI 2021

Juli
- Persiapan Sosialisasi dan Penyusunan Output Buku IDI 2021

Agustus
- Sosialisasi Hasil IDI 2021 dan IDI Metode Baru
- Penyusunan Buku IDI 2021

September
- Finalisasi Penyusunan Buku IDI 2021
- Penyusunan Draf Rekomendasi Menko Polhukam terkait IDI

Oktober
- Pemantauan capaian IDI

November
- Rakornas Penguatan Pokja IDI Provinsi di Makassar.

Desember
- Penerbita tindaklanjut melalui surat Mendagri ke seluruh Gubernur di Indonesia perihal arah kebijakan tindaklanjut pasca rilis Indeks Demokrasi Indonesia

3) Kendala dan Hambatan

Hal pokok yang menjadi hambatan dalam penyusunan IDI adalah terlambatnya target rilis, yang semula seharusnya terlaksana pada Maret 2022 (TW I), menjadi terlaksana pada Juni 2022 (TW II). Hal ini merupakan dampak dari beberapa penyempurnaan dalam proses penghitungan di BPS, sehingga membutuhkan waktu ekstra.

4) Tindaklanjut Kendala Indikator Kinerja 1:

a. Pada TA 2023 mendatang, Kemenko Polhukam akan terus mendorong BPS dan *stakeholder* lain agar target rilis IDI terlaksana pada bulan Maret.
b. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar *timelag* (keterlambatan) rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

b. Indikator kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.

1) Definisi Indikator Kinerja 2

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam adalah mengukur sejauhmana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Perjanjian kinerja mengamanatkan agar masing-masing Asisten Deputi menghasilkan satu rekomendasi yang terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dalam perjanjian kinerja target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan target rekomendasi IDI dan realisasi rekomendasi IDI.

2) Capaian Indikator Kinerja 2

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan program prioritas. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, capaian untuk indikator persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam adalah 50%. Terdapat perbedaan cara menghitung

indikator tersebut antara tahun 2021 dan 2022, sehingga capaiannya pun berbeda. Capaian indikator tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam	100%	100%	100%	50%

Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan instansi atau para *stakeholder* lainnya.

3) Kendala dan upaya mengatasi: NIHIL.

c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti

1) Definisi Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti ini ditetapkan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Cara menghitung indikator 3 ini adalah (butir-butir rekomendasi yang ditindaklanjuti/butir-butir rekomendasi yang dihasilkan) x 100%. Jadi, setiap butir yang ada di dalam rekomendasi berpengaruh terhadap penilaian kinerja Deputi. Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2021, target indikator kinerja 3 sebesar 50%.

2) Capaian Indikator Kinerja 3

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah direkomendasikan kepada K/L terkait. Sepanjang tahun 2022, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai

96,5% atau melebihi target yang telah ditetapkan dan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti	50%	96,4%	50%	96,5%

Adapun penjelasan terkait capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Tindaklanjut Rekomendasi

No	Keasdepan	Jumlah Rekomendasi	Butir Rekomendasi	Tindaklanjut Butir Rekomendasi	Capaian (%)
1	Asdep Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	2	5	5	100%
2	Asdep Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1	11	11	100%
3	Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	2	3	2	66,6%
4	Asdep Koordinasi Otonomi Khusus.	4	10	10	100%
TOTAL		9	29	28	9,5%

3) Kendala dan Upaya Mengatasi

NIHIL

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Pencapaian sasaran strategis dua adalah untuk terpenuhinya peningkatan birokrasi yang efektif. Pengukuran sasaran strategis menggunakan empat alat ukur indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2. Meningkatnya Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	4. Nilai SAKIP	A	BB
	5. Nilai PMPRB	33,94	35,70
	6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Skala 1-5)	4	4,5
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.	85	88

a. Indikator Kinerja 4: Nilai SAKIP

a. Definisi Indikator Kinerja 4

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen penilaian evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu (a) Perencanaan Kinerja, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, (d) Evaluasi Internal.Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Nilai
AA	91-100
A	81-90
BB	71-80
B	61-70
CC	51-60
C	31-50
D	0-30

b. Capaian Indikator Kinerja 4

Pada perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, target nilai SAKIP adalah A. Kegiatan yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja:
   - Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Eselon I s.d. II;
   - Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022;
   - Menyusun Rencana Aksi Tahun 2022;
   - Menyusun TOR dan RAB (Rencana Anggaran Biaya);
   - Pendampingan penyusunan pagu anggaran Kemenko Polhukam TA 2023.
2. Pengukuran Kinerja:
   - Menyusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Pelaporan Kinerja:
   - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d Eselon IV pada Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Tahunan 2021, dan Triwulan I s.d. IV Tahun 2022;
   - Pelaporan kinerja eselon I s.d. III ke esr.menpan.go.id;
   - Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2021 dalam aplikasi sistem kinerja pegawai SKP dalam simpeg.polkam.go.id dan berkala secara bulanan;
   - Penginputan data kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2022 pada aplikasi E-Monev Bappenas.
4. Evaluasi Kinerja:
   - Telah dilakukan evaluasi kinerja secara rutin dalam rapat internal staf Deputi Bidkoor Poldagri;
   - Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi program kerja selama triwulan I,II, III dan IV tahun 2022;
   - Workshop Evaluasi SAKIP;
   - Sosialisasi aplikasi SAPIT;

- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon I di Kemenko Polhukam.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Nomor B-229/PW.03.00/9/2020 tanggal 28 September 2022, hal Laporan Evaluasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022, Nilai SAKIP unit untuk periode 2022 mencapai 78,60 dengan kategori BB (Sangat Baik). Perbedaan capaian dan target disebabkan adanya perubahan metode penilaian. Dengan demikian, capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Triwulan Tahun 2021	Target 2022	Realisasi Triwulan 2022
Nilai SAKIP	A	A	A	BB

c. Kendala Indikator Kinerja 4

Penerapan metode baru memerlukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa kegiatan.

d. Tindaklanjut Indikator Kinerja 4

Melakukan penyesuaian terhadap metode baru.

b. Indikator Kinerja 5: Nilai PMPRB

a. Definisi Indikator Kinerja 5

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sumber data RB adalah laporan hasil penilaian mandiri dari masing-masing kedeputian.

Nilai PMPRB akan dihitung oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dari delapan komponen yakni (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penataan Sistem Manajemen SDM; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Capaian Indikator Kinerja 5

Berdasarkan rapat pleno bersama Inspektorat, nilai PMPRB Unit Deputi Bidang Koordiansi Politik Dalam Negeri dapat diverifikasi sebesar 35,70. Capaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja 5 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	33,93	34,06	33,94	35,70

Kegiatan dalam delapan area perubahan untuk mencapai target tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
   - Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022;
   - Telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022;
   - Penetapan Agen Perubahan (*agent of change*);
   - Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022.
2. Penataan dan Penguatan Organisasi
   - Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui personel dalam jabatan dan kenaikan pangkat;
   - Penataaan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
   - Terbitnya Keputusan Menko Polhukam Nomor 12 tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Papua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
4. Penataan Sumber Daya Manusia
   - Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021;
   - Penetapan dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022;

- Pelaksanaan Diklat dan Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan SDM;
- Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- Bimbingan Teknis Penerapan Tandatangan Elektronik.

5. Penataan Tata Laksana
   - Pengelolaan Peta Proses Bisnis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022.
6. Penguatan Pengawasan
   - Pelaporan LHKPN/LHKASN;
   - Bimbingan Teknis SPIP;
   - Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2022;
   - Evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit Deputi Bidkoor Poldagri.
7. Penguatan Akuntabilitas Kerja
   - Review Rencana Strategis (Renstra);
   - Menyusun Perjanjian Kinerja serta manualnya Eselon I dan II periode tahun 2022;
   - Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022;
   - Melakukan evaluasi kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara berkala setiap tiga bulan sekali;
   - Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Triwulan I s.d. IV Tahun 2022;
   - Pendampingan penyusunan pagu anggaran Kemenko Polhukam TA 2023;
   - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon I di Kemenko Polhukam.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   - Melakukan penyebaran kuisoner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;

- Kedeputian I/Poldagri terdapat: SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di-*update* maupun media sosial Kedeputian Bidkoor Poldagri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan review internal terhadap pelayanan kedeputian;
- Pelayanan pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat;
- Pengelolaan arsip dalam rangka audit arsip;
- Finalisasi pemetaan kebutuhan data dalam rangka perencanaan pembangunan dashboard data bidang Polhukam;
- Diseminasi Satu Data Indonesia dalam rangka Implementasi Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2022.

c. Kendala Indikator Kinerja 5

- Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terpenuhi;
- Sarana dan Prasarana pendukung belum maksimal;
- Anggaran kegiatan reformasi birokrasi belum optimal.

d. Tindaklanjut Indikator Kinerja 5

Berkoordinasi dengan Sekretariat Kemenko Polhukam dalam rangka dukungan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran.

c. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)

a. Definisi Indikator Kinerja 6

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada unit organisasi di Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri atau *stakeholder* lainnya. Tingkat kepuasan tamu ini diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sumber data dalam penghitungan indikator kinerja ini adalah penilaian berdasarkan survei eksternal Sekretariat Deputi.

b. Capaian Indikator Kinerja 6

Dalam perjanjian kinerja tahun 2022, target Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi adalah 4 (empat). Setelah dilakukan survei terhadap

stakeholder Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja 6 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)	4	4	4	4,5

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyebaran kuisioner setiap rapat,
2. Publikasi kegiatan melalui media sosial,
3. Bimbingan teknis pelayanan publik,
4. Pelaksanaan SP4N LAPOR,
5. Menerima audiensi dari para *stakeholder* Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,
6. Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja,
7. Pengelolaan aplikasi SRIKANDI,
8. Pengelolaan arsip dalam rangka audit arsip,
9. Bimtek pengelolaan informasi dan dokumentasi,
10. Analisa jabatan dan beban kerja;
11. Diseminasi Satu Data Indonesia dalam rangka Implementasi Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2022;
12. Bimbingan Teknis Penerapan Tandatangan Elektronik;
13. Penataaan Organisasi Tahun 2024;
14. Finalisasi Pemetaan Kebutuhan Data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Dashboard Data Bidang Polhukam.

c. Kendala Indikator Kinerja 6

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan publik.

d. Tindaklanjut Indikator Kinerja 6

Pengajuan sarana dan prasaranan untuk pelayanan publik.

d. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

1) Definisi Indikator Kinerja 7

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran. Lembar kerja evaluasi yang disusun oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

2) Capaian Indikator Kinerja 7

Indeks ini dihitung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi (PO) Kemenko Polhukam. Dalam penilaian tersebut setidaknya ada delapan komponen, yakni ketepatan waktu dokumen perencanaan (Bobot 7,5), keselarasan TOR dan RAB (Bobot 7,5), jumlah revisi (Bobot 10,00), keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional (Bobot 20,00), respons perencanaan unit organisasi, (Bobot 5,00) ketepatan waktu dokumen monev (Bobot 12,5), kualitas laporan kinerja (Bobot 12,5) , kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan (Bobot 12,5), respons bagian monev unit organisasi (Bobot 12,5).

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam Nomor B-25/PR.01.00/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal penyampaian nilai indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran tahun 2022, maka nilai Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam negeri sebesar 88 atau 103,5% dari target. Dengan demikian capaian tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja 7 (2021-2022)

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	98	85	88

Untuk mencapai nilai tersebut, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

a. Penyelarasan TOR dan RAB,

b. Penyelarasan dokumen unit dengan dokumen perencanaan nasional,

c. Menyusun laporan kinerja Deputi Bidkoor Poldagri tahun 2021 dan triwulan I s.d. IV tahun 2022;

d. Bimbingan teknis aplikasi KRISNA;

e. Melaksanakan monev triwulan I s.d. IV tahun 2022;

f. Pendampingan penyusunan pagu anggaran Kemenko Polhukam TA 2023.

3) Kendala Indikator Kinerja 7

Nihil

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 7

Nihil

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang ada dalam perjanjian kinerja, ada juga capaian kinerja lainnya yang dihasilkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Terselesaikannya sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo sejak tahun 2020. Pada tanggal 1 April 2022 sudah dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo;
2. Rekomendasi nomor B-26/DN.00.03/2/2022 perihal usulan percepatan pembentukan nama antar kementerian untuk membuat regulasi pengangkatan/penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022, 2023 & 2024;
3. Rekomendasi setiap minggu dalam bentuk produk *Executive Summary* tentang isu yang sedang trending & terupdate setiap minggunya Pilpres, Pileg, Pilkada 2024.

E. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami *automatic adjustment* untuk yang kedua kalinya sebesar Rp 2.301.286.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga pagu menjadi Rp 12.217.673.000. Kemudian pada triwulan IV terjadi penyesuaian kembali menjadi Rp 12.892.512.000 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, serapannya mencapai Rp12.810.438.731- (dua belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau 99,36%. Secara umum kinerja anggaran sudah

berjalan sesuai dengan rencana dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama tahun 2022. Namun , dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang ada,diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan politik dalam negeri ke depan.

Tabel 25 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Jan s.d. Des	%	Sisa
1	2	3	6	7	8
4551.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	1.926.588.000	1.913.347.599	99,31	13.240.401
4551.ABC.001	Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2.736.595.000	2.729.629.099	99,29	6.965.901
4551.PBC.003	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol	1.527.405.000	1.519.844.874	99,51	7.560.126
4551.ABC.003	Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus	1.353.329.000	1.344.876.369	99,38	8.452.831
4551.ABC.004	Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat	4.059.320.000	4.016.691.840	98,95	42.628.160
4551. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	806.257.000	804.777.750	99,82	1.479.250
4551.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	483.018.000	481.271.200	99,64	1.746.800
Jumlah		**12.892.512.000**	**12.810.438.731**	**99,36**	**82.073.269**

F. EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur efektivitas sumber daya yang dimiliki terhadap target kinerja tahunan, maka Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga membuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini mengukur efisiensi dari sumber daya keuangan, manusia dan teknologi.

a. Sumber Daya Keuangan

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan setelah dua tahun menyebarnya virus Covid-19 sejak tahun 2020. Munculnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sangat berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali penganggaran di instansi pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus melakukan penyesuaian anggaran kegiatan untuk mendukung upaya penananganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat maupun daerah. Dampak dari pandemi Covid 19 tersebut, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami *automatic adjustment* untuk yang kedua kalinya sebesar Rp 2.301.286.000 (dua miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga pagu anggaran menjadi Rp 12.217.673.000. Kemudian, triwulan IV tahun 2022 terdapat penyesuaian kembali sehingga pagu akhir menjadi Rp 12.892.512.000 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Namun demikian, *automatic adjustment* tidak menghentikan pencapaian target yang telah ditetapkan di awal tahun.

b. Sumber Daya Manusia

Saat ini, jumlah personel di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mencapai 34 orang. Namun demikian, meskipun ada posisi yang belum terisi tidak mempengaruhi capaian kinerja yang masih sejalan dengan target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama awal Januari hingga akhir Desember 2022. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Demikian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2022 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN